

Analisis determinan kemiskinan dan hubungannya dengan program pengentasannya Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Henny Nurafni*; M. Rachmad.R; Muhammad Safri

Program Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana, Universitas Jambi

**E-mail korespondensi: henny.nurafni1981@gmail.com*

Abstract

The poverty that occurs in various regions in Indonesia is an issue that is always interesting to discuss. This research aims to analyze the determinants of poverty and their relationship with the district/city alleviation program in Jambi Province. The data used in this study are secondary in 2013-2018. The analysis results show that the factors affecting district/city poverty in Jambi Province in the 2013-2018 period were the Human Development Index (HDI) and Economic Growth. Based on several variables used, the poverty determinant that significantly influences district/city poverty in Jambi Province is the Human Development Index (HDI) and economic growth. Referring to the analysis results, it can be seen that there is a strong relationship between poverty alleviation programs and poverty reduction. Therefore, this study recommends implementing a strategy to improve the quality and quantity of human resources in managing natural resources to enhance the economy of districts/cities in Jambi Province to reduce poverty.

Keywords: *Poverty determinant, Poverty alleviation program*

Abstrak

Kemiskinan yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia merupakan isu yang selalu menarik untuk dibahas. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisa determinan kemiskinan dan hubungannya dengan program pengentasannya kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2013-2018. Hasil analisis menunjukkan faktor yang mempengaruhi kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2013-2018 adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan beberapa variabel yang digunakan maka determinan kemiskinan yang secara signifikan memberikan pengaruh terbesar terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada hasil analisis tersebut terlihat adanya hubungan yang kuat antara program pengentasan kemiskinan dan penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, pada penelitian ini merekomendasikan untuk menerapkan strategi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam guna peningkatan terhadap perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang terjadi.

Kata kunci: Determinan kemiskinan, program pengentasan Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang salah satunya Indonesia. Berbagai usaha dan upaya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin mulai dari lingkup daerah, regional, nasional maupun internasional. Masalah kemiskinan terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia, sementara tujuan dari pembangunan di Indonesia sendiri yang tertuang

didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan bisa menata kehidupan yang layak untuk rakyat Indonesia dan salah tujuan pembangunan nasional tersebut adalah upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Terdapat dua indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (Jonaidi, 2012).

Negara-negara yang masuk kedalam kategori negara berkembang berupaya dengan keras dan dengan giatnya menuju pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal dan mengurangi angka kemiskinan. Tetapi kondisi ini tidak tercapai di negara-negara berkembang seperti Indonesia, karena pada saat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ternyata juga diiringi masalah bertambahnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Maka dari itu harus dilakukan secara menyeluruh dalam menanggulangi kemiskinan termasuk juga penyebab kemiskinannya. Dan ada beberapa bagian dari penanggulangan kemiskinan yang perlu disempurnakan, seperti peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta memperluas lapangan pekerjaan. Dengan ini dilakukannya pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah pembangunan seperti kemiskinan, dan pembangunan dilakukan sesuai keutamaannya dan kebutuhan masing-masing daerah dengan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dengan jangka panjang dan jangka pendek.

Keberhasilan pembangunan dapat menyembuhkan kemiskinan atau paling tidak dikurangi. Penting juga untuk mengkaji kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan dengan mendalami lebih dulu faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di daerah tersebut. Faktor-faktor yang penting untuk dikaji yaitu seperti tingkat pengangguran, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pertumbuhan ekonomi regional di daerah, serta belanja pemerintah daerah yang bersumber dari APBD. (Azwar & Subekan, 2016)

Studi ekonomi menjelaskan jika pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi juga merupakan indeks penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan. Tujuan dari berhasilnya pertumbuhan ekonomi salah satunya dilihat dari angka kemiskinannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan mengakibatkan *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pemerataan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang tinggi diseluruh sektor usaha dan seluruh golongan masyarakat akan mengurangi kemiskinan secara cepat. Selain itu melalui pertumbuhan ekonomi juga dapat menciptakan kemakmuran masyarakat dalam memberantas beragam permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti kemiskinan dan pengangguran.

Efektifitas penggunaan sumber-sumber daya yang ada juga menjadi salah satu aspek penting untuk melihat kinerja pembangunan sehingga lapangan pekerjaan dapat menyerap angkatan kerja yang ada. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi maka produksi barang dan jasa juga ikut meningkat. Sehingga memerlukan tenaga kerja yang lebih untuk memproduksi barang dan jasa tersebut, dan diharapkan pengangguran akan berkurang dan kemiskinan juga akan turun.

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi disuatu daerah bisa dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan, serta melihat juga sejauh mana pemerataan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan akan timbul disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan ekonomi yang tidak melihat terlebih dahulu apakah pertumbuhan tersebut lebih kecil atau lebih besar dari tingkat perubahan struktur ekonomi ataupun tingkat pertumbuhan penduduknya.

Tabel 1 Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jambi 2008-2018

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Provinsi Jambi	7.07	7.76	4.21	4.37	4.64	4.71
Kerinci	6.16	9.06	6.45	6.7	6.03	5.10
Merangin	6.45	7.13	5.48	6.21	5.55	5.17
Sarolangun	7.61	5.2	3.09	4.26	4.69	4.72
Batanghari	6.48	7.56	4.36	4.55	4.82	4.96
Muaro Jambi	7.15	8.03	5.24	5.43	5.06	5.27
Tanjung Jabung Timur	4.57	5.81	1.87	2.7	3.13	3.13
Tanjung Jabung Barat	5.73	5.85	3.98	3.14	4.25	6.89
Tebo	7.63	8.83	5.28	5.38	5.6	5.02
Bungo	9.02	6.74	5.13	5.2	5.67	4.72
Kota Jambi	8.5	8.17	5.56	6.81	4.68	5.48
Kota Sungai Penuh	8.45	7.54	7.06	6.51	6.24	5.54

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2008-2018 (diolah)

Laju pertumbuhan ekonomi kabuapten/kota di Provinsi Jambi dalam 8 tahun terakhir dilihat dari tahun 2013 sampai 2018 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi yang turun cukup signifikan terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 2014 dari 5,81% menjadi 1,87% pada tahun 2015, dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan turunya tingkat penyerapan tenaga kerja dan pendidikan.

Pengangguran mempunyai efek mengurangi pendapatan masyarakat yang akan mengurangi tingkat kemakmuran, ketika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh bisa terlaksana maka pendapatan masyarakat tinggi. Ketika tingkat kemakmuran turun maka akan menimbulkan masalah kemiskinan. Kemiskinan dan pengangguran, keduanya berhubungan dengan mutu sumber daya manusianya.

Orang miskin maka tidak bisa meneruskan sekolah yang lebih tinggi dan membuat pendidikan rendah, yang berujung pada terbatasnya dalam mencari lapangan pekerjaan. Sehingga salah satu cara merentas kemiskinan dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan yang rendah merupakan salah satu dari karakteristik kemiskinan, karena pendidikan berpengaruh dalam mengembangkan ilmu dan keterampilan yang akhirnya meningkatkan produktivitas kerja dan memperbesar peluang memperoleh pekerjaan. Angka partisipasi sekolah bisa untuk menjadi alat ukur tingkat pendidikan.

Selain itu jumlah penduduk juga mempengaruhi tingkat kemiskinan karena jumlah penduduk yang tinggi jika tidak diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang baik maka akan menjadi beban pembangunan. Jumlah penduduk yang tinggi akan mengurangi kas pemerintah yang terbatas untuk menyediakan berbagai pelayanan kesehatan, ekonomi, dan sosial bagi generasi baru. Tingginya beban biaya anggaran pemerintah akan mengurangi usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup yang akan berdampak terjadinya transfer kemiskinan pada generasi mendatang yang berasal dari keluarga menengah ke bawah.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang kompleks dan multidimensional. Oleh karenanya perlu dicari solusi untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan. Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program

penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Keberhasilan Provinsi Jambi dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi yaitu diatas 7 persen. Rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jambi periode 2013-2018 masih relatif tinggi yaitu di atas 7,92 persen. Persentase ini masih jauh dari target pencapaian penurunan angka kemiskinan yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 yaitu pada tahun 2018 ditargetkan persentase angka kemiskinan di Provinsi Jambi berada pada angka 6,84 persen. Sementara berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 ditargetkan pada tahun akhir RPJMD persentase kemiskinan di Provinsi Jambi sebesar 3,80 persen.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua Negara di dunai dewasa ini. Pemerintah di Negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdsarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional (Todaro, 2000).

Tabel 2 Tingkat kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2008-2018

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Provinsi Jambi	8.41	8.39	8.84	8.41	8.19	7.92
Kerinci	7.35	7.43	8.15	7.48	7.45	7.07
Merangin	9.31	9.37	9.76	9.95	9.43	8.88
Sarolangun	10.51	10.17	10.24	9.33	8.87	8.73
Batanghari	10.42	10.5	10.78	10.79	10.33	10.23
Muaro Jambi	4.58	4.45	4.59	4.3	4.37	4.05
Tanjung Jabung Timur	13.42	13.55	14.12	12.76	12.58	12.38
Tanjung Jabung Barat	11.61	11.64	12.58	11.81	11.32	11.1
Tebo	6.86	6.89	7.12	6.87	6.79	6.58
Bungo	5.25	5.12	5.67	5.99	5.82	5.78
Kota Jambi	8.91	8.94	9.64	8.87	8.84	8.49
Kota Sungai Penuh	3.3	3.33	3.42	3.13	2.78	2.76

Sumber: BPS Provinsi Jambi Tahun 2013-2018 (diolah)

Beragam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah dimulai dari zaman pemerintahan Presiden Suharto sampai dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi. Berikut ini beragam program pengentasan kemiskinan yang pernah dilakukan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia termasuk Provinsi Jambi.

Untuk Provinsi Jambi terdapat beberapa program untuk pengentasan kemiskinan antara lain: Simpanan keluarga sejahtera, program beras untuk keluarga miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra), program Indonesia pintar, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Samisake (Satu Milyar Satu Kecamatan)

Dari sekian banyak program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan dan diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia tersebut ternyata tidak serta merta mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonsia termasuk Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Selain berbagai program pengentasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah tidak sedikit pula biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam dalam mengentaskan kemiskinan di masing-masing Kabupaten/kota di Provisin Jambi baik berupa pendanaan pembangunan infrastruktur maupun pendanaan non infrastruktur. Pendanaan infrastruktur yang tertuang didalam belanja infrastruktur

yang pro kepada masyarakat miskin terlihat masih minim dan belum dapat menurunkan angka tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Menurut Tambunan (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang (Tambunan, 2011). Menurut Sharp (dalam Kuncoro, 2006), terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan. Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah rendahnya sumber daya manusia yang disebabkan karena rendahnya pendidikan.

Berpijak pada kenyataan–kenyataan yang telah dijelaskan tersebut maka penulis tertarik untuk mengamati masalah kemiskinan dengan program pengentasan kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data panel, yaitu data terdiri dari dua bagian yaitu: *time series* dan *cross section*. Data *time series* adalah data tahunan yang dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dan *cross section* adalah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Sumber data dari Badan Statistik Provinsi Jambi dan instansi terkait yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Adapun data yang digunakan bersumber dari data kabupaten/kota tentang kemiskinan, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, belanja infrastruktur, jumlah kesempatan kerja, program pengentasan kemiskinan.

Model analisis data

Model analisis pertama

Untuk menjawab tujuan pertama model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model regresi data panel sebagai berikut:

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 PE_{it} + \beta_3 B.Inf_{it} + \beta_4 L.K_{it} + e$$

Dimana :

- TK =Tingkat kemiskinan
- IPM =Indeks pembangunan manusia Kabupaten/kota
- PE =Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota
- B. Inf =Belanja infrastruktur Kabupaten/kota
- K.K =Kesempatan kerja Kabupaten/Kota
- i =Jumlah observasi di Provinsi Jambi => 11
- t =Tahun data observasi (Tahun/deret waktu) => 10 tahun
- β_i =Koefisien (banyaknya peubah bebas) => 1,2,3
- e =Komponen *error term*

Model analisis kedua

Untuk menjawab tujuan kedua model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model *Chi-Square* sebagai berikut:

Chi square merupakan metode perhitungan statistika non parametrik yang jenis datanya harus bersifat nominal atau kategorik. Uji *chi square* menurut (Andi Supangat dalam Aziz, 2007:364) merupakan “uji hipotesis tentang asosiasi atau korelasi antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan yang didasarkan pada hipotesis tertentu pada setiap penelitian”. Ekspresi matematis tentang distribusi chi square hanya tergantung pada suatu parameter, yaitu derajat kebebasan (*degree of freedom*). Adapun rumus uji chi square adalah sebagai berikut:

$$X^2 = \sum \frac{(O_i - e_i)^2}{e_i}$$

$$e_{ij} = \frac{\sum_i O_i \cdot \sum_j O_j}{\sum_{ij} O_{ij}}$$

Keterangan:

X^2	=Nilai chi hitung	$\sum i$	=Jumlah skor aktual
e_{ij}	=Frekuensi yang diharapkan	$\sum j$	=Jumlah skor ideal
O_i	=Skor aktual	$\sum ij$	=Skor total
e_i	=Skor ideal		

Dengan kriteria penerimaan :

Tolak H_0 jika nilai Sig. *Chi square* pada output SPSS \leq dari 0,05 (α).

Terima H_0 jika nilai Sig. *Chi square* pada output SPSS $>$ dari 0,05 (α).

Model analisis ketiga

Untuk menjawab tujuan ketiga model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model SWOT sebagai berikut:

Menurut Freddy Rangkuti Analisis swot adalah indifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenghths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Analisis SWOT menurut Sondang P. Siagian merupakan salah satu instrument analisi yang ampuh apabila digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas bahwa “SWOT merupakan akronim untuk kata- kata *strenghths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *htreats* (ancaman).

Kondisi kemiskinan kabupaten/kota

Kondisi kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jambi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mempunyai kecenderungan menurun meskipun masih relatif tinggi untuk beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi. Penurunan yang terjadi menunjukkan keberhasilan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam menurunkan angka kemiskinan melalui beberapa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Untuk jelasnya perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.

Dilihat dari perkembangan persentase penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Jambi dari tahun 2013-2018 terdapat kecenderungan menurun meskipun dalam persentase yang kecil. Penurunan persentase penduduk miskin ini menunjukkan

keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan berbagai bentuk program kemiskinan yang dicanangkan secara nasional.

Tabel 3 Persentase penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2013-2018

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kerinci	7.35	7.43	8.16	7.48	7.45	7.07
Merangin	9.31	9.37	9.8	9.95	9.43	8.88
Sarolangun	10.51	10.17	10.29	9.33	8.87	8.73
Batanghari	10.42	10.5	10.69	10.79	10.33	10.23
Muaro Jambi	4.58	4.45	4.63	4.3	4.37	4.05
Tanjung Jabung Timur	13.42	13.55	14.17	12.76	12.58	12.38
Tanjung Jabung Barat	11.61	11.64	12.63	11.81	11.32	11.1
Tebo	6.86	6.89	7.12	6.87	6.79	6.58
Bungo	5.25	5.12	5.7	5.99	5.82	5.78
Kota Jambi	8.91	8.94	9.67	8.87	8.84	8.49
Kota Sungai Penuh	3.3	3.33	3.43	3.13	2.78	2.76

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2014-2019 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2018 berada di antara 3,13 persen sampai 6,89 persen. Berikut ini disajikan tabel laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2013 sampai 2018.

Laju pertumbuhan pada sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan angka positif yang secara simultan menyebabkan perekonomian di Provinsi Jambi pada 2018 mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari tahun sebelumnya, meskipun ada kabupaten/kota yang mengalami perlambatan.

Indeks pembangunan manusia kabupaten/kota

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Jambi cenderung meningkat setiap tahunnya hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada aspek pendidikan, kesehatan dan pengeluaran penduduk di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2013-2018.

Belanja daerah pemerintah kabupaten/kota

Pengeluaran daerah tahun 2017 mengalami peningkatan 4,65 persen atau mencapai 13,74 triliun rupiah dari sekitar 13,13 triliun rupiah pada tahun 2016. Apabila dilihat dari strukturnya, kenaikan belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar 0,02 persen. Adapun belanja langsung yang terkait dengan program tahun 2017 naik 11,31 persen. Peningkatan belanja langsung dipengaruhi oleh peningkatan yang cukup besar pada belanja barang dan jasa yaitu sebesar 19,16 persen.

Belanja pemerintah daerah yang terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung pada APBD 2018 dianggarkan menurun sebesar 7,22 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya. Belanja Tak Langsung diperkirakan meningkat dari 6,64

triliun rupiah pada 2017 menjadi sebesar 7,23 triliun rupiah pada tahun 2018 atau naik sebesar 8,92 persen dari realisasi tahun 2017. Begitu halnya dengan belanja langsung yang ditargetkan naik dari 6,09 triliun rupiah pada realisasi 2017 menjadi 6,42 triliun rupiah pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 5,37 persen.

Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2018 menambah kontribusi Belanja Tidak Langsung dari 52,13 persen tahun 2017 menjadi 52,96 persen. Sementara itu, Belanja Langsung turun dari 47,87 persen tahun 2017 menjadi 47,04 persen pada tahun 2018. Belanja modal yang dapat memberikan output lebih bagi Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2018 turun sebesar 5,07 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja masih cukup besar yaitu 43,01 persen pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan pemerintah kabupaten/kota masih memiliki kecenderungan mengalokasikan dananya pada belanja bersifat pendanaan aparatur negara.

Kondisi program pengentasan kemiskinan kabupaten/kota

Program beras untuk keluarga miskin

Program Raskin/Rastra adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Pada tabel dibawah ini akan memperlihatkan jumlah rumah tangga miskin di kabupaten/kota yang telah mendapatkan bantuan beras dari tahun 2013-2018. Jumlah rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan beras sejahtera atau raskin cenderung meningkat pada beberapa daerah namun terdapat juga kecenderungan menurun seperti Kota Sungai Penuh jumlah rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan beras sejahtera cenderung menurun terlihat pada tahun 2013 terdapat 1.554 RTM menurun pada tahun 2018 menjadi 735 RTM yang menerima bantuan beras sejahtera

Program Indonesia pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin atau anak yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar ini sangat membantu kepada anak dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan pendidikan kepada jenjang yang lebih tinggi. Dengan harapan jika anak-anak dari keluarga miskin dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi maka keluarga tersebut dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dapat meningkatkan kesejahteraannya pada masa yang akan datang. Pada tabel dibawah ini akan memperlihatkan jumlah anak yang mendapatkan bantuan pendidikan dari Program Bantuan Siswa Miskin atau Program Indonesia Pintar. Jumlah siswa dari rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan dana pendidikan dari setiap tahunnya cenderung meingkat dengan harapan seluruh anak usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin dapat menerima bantuan tersebut guna dapat melanjutkan pendidikan sampai dengan jenjang yang lebih tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan

Dari hasil pemilihan model yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya dihasilkan model *Fixed Effect* sebagai model yang tepat untuk melakukan interpretasi terhadap regresi data panel dalam penelitian ini. Untuk menghasilkan regresi data panel dalam penelitian ini tetap menggunakan aplikasi *Eviews* 9.0 yang umumnya juga

digunakan untuk melakukan berbagai analisis regresi seperti regresi data panel. Pada analisis regresi Model *Fixed Effect* ini untuk variabel terikat adalah Jumlah Kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jambi sedangkan variabel bebas terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi (PE), belanja infrastruktur (BINF) dan jumlah kesempatan kerja (JKK) kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan periode dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Pada tabel dibawah ini akan diuraikan hasil regresi panel data dengan menggunakan model *Fixed Effect* sebagai model yang tepat untuk penelitian ini. Hasil regresi data panel yang telah dilakukan dengan menggunakan model *Fixed Effect* akan memperlihatkan variabel independen yang akan menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam periode 2013-2018. Hasil model *Fixed Effect* sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil analisis regresi model *fixed effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.08818	6.509189	3.086126	0.0033
IPM?	-0.224375	0.077268	-2.903846	0.0054
PE?	-0.152064	0.056438	-2.694339	0.0095
BINF?	0.016826	0.012286	1.369445	0.1769
JKK?	0.036680	0.043831	0.836863	0.4066
Fixed Effects (Cross)				
_Kerinci--C	-0.319551			
_Merangin--C	0.930235			
_Sarolangun--C	1.170031			
_Batanghari--C	2.316699			
_Muarojambi--C	-4.282220			
_Tanjatim--C	2.737642			
_Tanjabar--C	2.399555			
_Tebo--C	-1.805338			
_Bungo--C	-2.230171			
_Kotajambi--C	2.774238			
_Kotsupen--C	-3.691119			
Effects Specification				
R-squared	0.982939	Mean dependent var		8.248030
Adjusted R-squared	0.978256	S.D. dependent var		2.939958
S.E. of regression	0.433522	Akaike info criterion		1.362969
Sum squared resid	9.585017	Schwarz criterion		1.860618
Log likelihood	-29.97797	Hannan-Quinn criter.		1.559614
F-statistic	209.8802	Durbin-Watson stat		1.459623
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, 2020

Model regresi berganda Random Effect Model:

$$TK_{it} = \beta_i + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 PE_{it} + \beta_3 B.Inf_{it} + \beta_4 K.K_{it} + e$$

$$Y = 20.08818 - 0.224375 - 0.152064 + 0.016826 + 0.036680$$

Pengujian parsial dan overall

Uji parsial

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Hasil uji t dapat ditunjukkan pada tabel Model *Fixed Effect* diatas. Uji hipotesis ini bertujuan untuk

mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, belanja infrastruktur dan kesempatan kerja terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Jambi. Dengan membandingkan probabilitas t dengan nilai α 0,05 maka dapat diketahui apakah menolak atau menerima hipotesis. Dari hasil regresi data panel yang dilakukan dengan menggunakan model *fixed effect* sebagai berikut.

Pada hasil *fixed effect model* koefesien IPM = -0.224375, sedangkan nilai probabilitasnya = $0.0054 < \alpha$ 5%; maka disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2013-2018, diterima. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Jambi tetapi tidak signifikan. Hal ini menunjukkan jika nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi sekitar 22,43%, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Pada hasil *Fixed Effect Model* koefesien PE = -0.152064, sedangkan nilai probabilitasnya = $0.0095 < \alpha$ 5% ; maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2013-2018, diterima. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Jambi dan signifikan. Hal ini menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi sekitar 0.036% dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Pada hasil *fixed effect model* koefesien BI = -0.016826, sedangkan nilai probabilitasnya = $0.1769 > \alpha$ 5%; maka disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi belanja infrastruktur (BINF) berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2013-2018, ditolak. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja infrastruktur berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Jambi tetapi tidak signifikan. Hal ini menunjukkan jika nilai Indeks belanja infrastruktur meningkat sebesar 1 ribu rupiah maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi sekitar 1,68%, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Pada hasil *fixed effect model* koefesien JKK = -0.036680, sedangkan nilai probabilitasnya = $0.4066 > \alpha$ 5%; maka disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi jumlah kesempatan kerja (JKK) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2013-2018, ditolak. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Jambi tetapi tidak signifikan. Hal ini menunjukkan jika nilai jumlah kesempatan meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi sekitar 3,67%, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Uji overall

Uji F adalah pengujian terhadap koefesien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

pertumbuhan ekonomi, belanja infrastruktur dan jumlah kesempatan kerja terhadap jumlah penduduk miskin secara simultan dan parsial.

Berdasarkan Tabel 13 diatas nilai probabilita (F-statistik) lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 di tolak dan H_a diterima. Artinya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, belanja infrastruktur dan jumlah kesempatan kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2013-2018.

Selanjutnya dilakukan Uji Determinasi (R^2) untuk mengetahui besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Hasil Uji Determinasi (R^2) sebesar 0.982939 atau 98,29% yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, belanja infrastruktur dan jumlah kesempatan kerja) terhadap variabel dependen (jumlah penduduk miskin) adalah sebesar 98,29% sedangkan sisanya 1,71% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukan atau tidak dibahas dalam penelitian ini.

Dari hasil regresi data panel diatas terlihat faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2013-2018 yang paling signifikan adalah (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hal ini sesuai dengan pernyataan (Kuncoro, 2010:11) bahwasanya “Fokus utama dalam pembangunan adalah peningkatan kualitas manusia dan (2) pertumbuhan ekonomi, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kuncoro : 2005), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Analisis hubungan program pengentasan kemiskinan dengan penurunan kemiskinan

Pada penelitian ini pengujian data dengan menggunakan uji *chi-square* atau chi kuadrat dengan menentukan formulasi hipotesis

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa terdapat 30 data yang semuanya di proses ke dalam analisis (tidak ada data yang missing atau hilang) sehingga tingkat kevalidannya adalah 100%. Pada tabel 36 dibawah ini merupakan output *chi-square test* untuk program kemiskinan Indonesia Pintar (PIP) dengan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

Tabel 5. *Chi-square test* antara program Indonesia Pintar dengan tingkat penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2013-2018

	Value	df	Asympototic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	4224.000 ³	4160	0.240
Likelihood Ratio	550.262	4160	1.000
Linear by-Linear Asociation	1.625	1	0.202
N of Valid Cases	66		

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 11 diketahui *Asymp. Sig (2-side)* pada uji *Pearson Chi-Square* adalah sebesar 0.240. Karena nilai *Asymp. Sig (2-side)* $0.240 > 0,05$, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan diatas, dapat disimpulkan H_0 diterima. Dengan dimikian dapat diartikan bahwa terdapat hubungan antara program kemiskinan Indonesia Pintar dengan

penurunan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jambi. Hal ini dapat diartikan pula bahwa semakin banyak masyarakat yang menerima bantuan program Indonesia Pintar maka kemiskinan akan menurun.

Tabel 6. *Chi-Square Test* antara program Rastra/Raskin dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provins Jambi 2013-2018

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	4224.000 ³	4160	0.240
Likelihood Ratio	550.262	4160	1.000
Linear by-Linear Asociation	14.980	1	0.000
N of Valid Cases	66		

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 12 diketahui *Asymp. Sig (2-side)* pada uji *Pearson Chi-Square* adalah sebesar 0.240. Karena nilai *Asymp. Sig (2-side)* $0.240 > 0,05$, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan diatas, dapat disimpulkan H_0 diterima. Dengan dimikian dapat diartikan bahwa terdapat hubungan antara program bantuan Beras Masyarakat Miskin (Raskin) dengan penurunan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jambi. Hal ini dapat diartikan pula bahwa semakin banyak masyarakat yang menerima bantuan Beras Masyarakat Miskin (Raskin) maka kemiskinan akan menurun.

Strategi pengurangan kemiskinan

Analisis SWOT merupakan teknik analisis yang dapat memetakan posisi strategi dalam pengentasan kemiskinan.

Tabel 7. Diagram SWOT potensi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam mengurangi kemiskinan

	<i>Strenghts (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
Faktor Internal	1. Program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan 2. Potensi sumber daya alam 3. Ketersediaan tenaga kerja produktif	1. Kualitas sumber daya manusia 2. Akses terhadap sumber daya alam 3. Akses permodalan terbatas
Faktor Eksternal		
<i>Oppurtunities (O)</i>	Strategi S-O Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu “Strategi meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia untuk peningkatan kesejahteraan”	Strategi W-O Strategi yang menimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang yaitu “Strategi peningkatan usaha dan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kapasitas masyarakat”
<i>Treahts (T)</i>	Strategi S-T Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman “Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandiri masyarakat”	Strategi W-T Strategi yang menimalisir kelemahan untuk mengatasi ancaman yaitu “Strategi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing daerah dan nasional”
Faktor peluang eksternal 1. Perkembangan teknologi informatika 2. Kondisi ekonomi daerah dan nasional 3. Peluang usaha bagi masyarakat		
Faktor tantangan eksternal 1. Globalisasi dengan daya saing 2. Ketidakstabilan kondisi politik dan keamanan nasional 3. Kemandiri masyarakat dan keberlanjutan program		

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

Analisis SWOT adalah identifikasi terhadap berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*stengths*) dan peluang (*oppurtunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threatness*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengambilan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan (Rangkuti, 2000).

Berdasarkan hasil identifikasi potensi kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam pengentasan kemiskinan bahwa faktor kekuatan yang dimiliki lebih besar dibandingkan kelemahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi internal baik dari kapasitas sumber daya manusia dan dukungan pemerintah kabupaten/kota dapat meminimalkan kelemahan terhadap kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu perlu adanya upaya intensif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi potensi kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam pengentasan kemiskinan bahwa faktor eksternal peluangnya lebih besar dibandingkan faktor ancaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk miskin yang ada di kabupaten/kota Provinsi Jambi cukup potensial dalam menangkap peluang eksternal dalam menghadapi segala *kemungkinan ancaman eksternal yang dapat muncul sewaktu-waktu*.

Faktor Internal		
Lemah	Kuat	
	Skor IFAS = 0,6	
-1,00	1,00	Tinggi
Strategi peningkatan usaha dan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kapasitas masyarakat	Strategi meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia untuk peningkatan kesejahteraan	1,00
		Skor EFAS = 0,18
		Faktor Eksternal
		-1,00
Strategi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing daerah dan nasional	Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian masyarakat	

Gambar 1. Strategi Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
 Sumber: Data diolah, 2020

Hasil analisis SWOT diatas terlihat strategi yang dapat dilakukan untuk menurunkan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jambi adalah dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia untuk peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia secara tidak langsung dilakukan dengan terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat maka akan meningkatkan kualitas dan kapasitas

sumber daya manusia sehingga dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat mudah untuk dapat mengisi kesempatan kerja yang ada tentunya hal tersebut akan mengurangi pengangguran yang merupakan beban bagi penduduk miskin dan pada akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Implikasi kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota sehubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi, yaitu: Berdasarkan hasil analisis, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Oleh karena itu dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya akan berdampak kepada penurunan jumlah penduduk miskin yaitu kemampuan daya beli masyarakat meningkat dan sektor-sektor berkembang dengan pesat yang mampu menyerap kesempatan kerja yang luas. Terdapat hubungan yang kuat antara program kemiskinan yang dilakukan oleh kabupaten/kota di Provinsi Jambi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi semakin banyak jumlah rumah tangga miskin yang mendapatkan program pengentasan kemiskinan akan semakin besar pula penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang masuk dalam kategori miskin dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dibutuhkan strategi yang tepat dalam melakukan pengentasan kemiskinan salah satunya adalah Strategi meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia untuk peningkatan kesejahteraan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapasitas dalam mengelolan sumber daya alam yang berada di masing-masing kabupaten/kota dan secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota karena sumber daya alam yang ada dapat dikelola secara professional untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis mengenai determinan kemiskinan dan hubungannya dengan program pengentasan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jambi, menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: dari uji determinan yang dilakukan dalam penelitian ini maka faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2013-2018 adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE). Berdasarkan uji *Chi Square Test* yang dilakukan untuk melihat hubungan antara program pengentasan kemiskinan dengan penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jambi memperlihatkan nilai *Asym* nilai *Asymp. Sig (2-side)* $0.240 > 0,05$, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan di atas, dapat disimpulkan H_0 diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa terdapat hubungan antara program pengentasan kemiskinan dengan penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jambi. Dari hasil analisis SWOT strategi yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya peningkatan

kesejahteraan penduduk. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia secara tidak langsung dilakukan dengan terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat maka akan meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sehingga dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat mengelola sumber daya alam yang ada sebagai pendorong dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi ke depannya

Saran

Upaya dalam mendukung pengentasan kemiskinan ditentukan oleh peran pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Peningkatan peran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam pengentasan kemiskinan terlebih dahulu harus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi daerah karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota harus dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan agar jumlah penduduk miskin dapat dikurangi setiap tahunnya dengan persentase yang tinggi seiring dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Dari hasil analisis SWOT yang dilakukan strategi yang bersifat komprehensif untuk mengurangi kemiskinan terdiri dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan strategi peningkatan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini memiliki keterbatasan baik dalam cakupan wilayah dan indikator. Diharapkan pada penelitian yang akan datang cakupan indikator secara lebih komprehensif sesuai fakta empiris yang dihadapi oleh masyarakat miskin di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Supangat, (2007), *Statistika dalam kajian deskriptif, inferensial dan nonparametrik*. Edisi Pertama, Kecana: Jakara.
- Amijaya, Tisna D. (2008). *Analisis pengaruh disparitas pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, (2010). *Statistik Indonesia Tahun 2010*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik: Jambi
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2014-2019. *Jambi dalam Angka Tahun 2014-2019*. Jambi: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2014-2019. *Data dan informasi kemiskinan Kabupaten-Kota Provinsi Jambi Tahun 2014-2019*. Jambi: Badan Pusat Statistik.
- Dicky Djatnika Utama (2009). Peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik "Dialogue"*. 6(1): 1-12.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2014). *Neraca pendidikan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014-2019*. Jakarta
- Esmasar. (1986). *Sumber daya manusia, kesempatan kerja dan perkembangan ekonomi*. UI Press: Jakarta.
- Frank, Andre Gunder.(1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press: New York.
- Hermawati, Istiana. (2013). *Dampak program pengentasan kemiskinan di Kabupaten*

- Jayapura. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*. Edisi Dies Natalis ke-48 Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi pembangunan, teori, masalah dan kebijakan*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. (2000). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga. edisi ketujuh, terjemahan hari munandar*. Erlangga: Jakarta.
- Todaro, M. P. dan Smith Stephen. C. (2003). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Edisi Kedelapan, Jilid 2, Erlangga: Jakarta.